

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN TANGKAP DI PULAU MORO KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MUHAMMAD FARDHIANSYAH

NPP. 30.0278

Asdaf Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau  
Prodi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Email. moeza0114@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Umar Nain, S.Sos, M,Si

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** Karimun Regency has large marine natural resources so that it becomes the main sector in improving the economy of fishing communities. Moro Island is an area consisting of one or more activity centers in rural areas where the community is the fishery production system. Disproportionate income with fisheries production is a problem that must be resolved immediately in an effort to increase people's income. **Purpose:** to describe and analyze the inhibiting factors, efforts to overcome the inhibiting factors and community empowerment in increasing the income of fishermen on Moro Island, Karimun Regency. **Methods:** this study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, verification, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that due to the limited capital budget and the low human resources of fishing communities in the aspect of fishermen's catch management skills, it affects the work ethic of fishing communities in increasing their income. In the process of community empowerment in increasing the income of fishermen on Moro Island, there are obstacles that become inhibiting factors in empowerment, namely, internal factors which include human resources in the aspects of skills, capital, facilities and infrastructure. External factors which include, the lack of adaptation of fishing communities to technological advances, and bad weather. Efforts made in overcoming the inhibiting factors of community empowerment in increasing the income of fishermen on Moro Island, namely: Implementing empowerment programs such as counseling, outreach and training which are held twice a month. Provision of capital assistance and adequate facilities to fishing communities. **Conclusion:** community empowerment in increasing the income of fishermen on Moro Island has not run optimally, seen from the facilities and infrastructure provided by the Government that have not been evenly felt by all fishing communities on Moro Island.

**Keywords:** Government, Empowerment, Catch Fishers

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP)** : Kabupaten Karimun memiliki sumber daya alam laut yang besar sehingga menjadi sektor utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Pulau Moro merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan yang dimana masyarakat sebagai sistem produksi perikanan. Tidak sebandingnya pendapatan dengan hasil produksi perikanan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. **Tujuan** : untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat, upaya mengatasi faktor penghambat dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun. **Metode** : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena keterbatasan anggaran modal dan masih rendahnya SDM masyarakat nelayan dalam aspek keterampilan pengelolaan hasil tangkap nelayan mempengaruhi etos kerja masyarakat nelayan tangkap dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan yaitu, Faktor Internal yang meliputi, sumber daya manusia dalam aspek keterampilan, modal, sarana dan prasarana. Faktor Eksternal yang meliputi, kurangnya adaptasi masyarakat nelayan dengan kemajuan teknologi, dan cuaca yang buruk. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro yaitu: Melaksanakan program pemberdayaan seperti penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Pemberian bantuan modal dan fasilitas yang memadai kepada masyarakat nelayan.. **Kesimpulan** : pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro belum berjalan dengan optimal, dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah belum merata dirasakan seluruh masyarakat nelayan Pulau Moro.

**Kata Kunci** : Pemerintah, Pemberdayaan, Nelayan Tangkap

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar dengan garis pantai terpanjang ke dua didunia setelah Kanada dan memiliki jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau. Luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi dengan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dan luas daratannya hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi. Dengan perairannya yang luas, laut Indonesia menghasilkan potensi kelautan dan perikanan sangat besar Indonesia dapat menghasilkan yaitu 6,4 juta ton per tahunnya dan keanekaragaman sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.

Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki sumber daya laut yang banyak, di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai potensi perikanan tangkap yang sebagian besarnya terdapat di wilayah pengendalian perikanan laut Cina Selatan dan Natuna dengan potensiperikanan tangkap sebagaimana yang tertulis pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Potensi Kelautan Provinsi Kepulauan Riau**

Jens Sumberdaya Ikan (SDI)	Estimasi Potensial SDI	Estimas Tingkat Pemanfaatan	Peluang Pengembangan Produksi
	(ton/tahun)	(ton)	(ton)
Ikan Pelagis	559,828	84,060	475,768
Ikan Komersial	272,594	75,435	197,159
Ikan Karang	17,562	13,568	3,994
Total	849,984	173,063	676,921

*Sumber: Diolah oleh penulis (2022)*

Wilayah Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang mempunyai wilayah lautan yang luas. Sehingga hampir seluruh kecamatan yang adadi Kabupaten Karimun berada di wilayah pesisir dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun adalah masyarakat pesisir. Sebagai masyarakat yang menghuni daerah pesisir masyarakat Kabupaten Karimun mayoritas bekerja atau bermata pencaharian sebagai nelayan. Kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh para masyarakat nelayan umumnya masih menggunakan cara tradisional hanya sebagian kecil yang telah menggunakan teknologi pada proses penangkapan.

Pulau Moro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karimun yang ditetapkan sebagai sentra pengembangan sektor perikanan.

Kebijakan ini ini didukung dengan penetapan Moro sebagai Penetapan Kawasan Minapolitan (Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi perikanan dan pengelola Sumber Daya Alam tertentu) berdasar Keputusan Bupati Karimun Nomor 148.A Tahun 2011 tertanggal 23 Mei 2011 dan secara nasional didukung dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010 yang menetapkan Kabupaten Karimun sebagai salah satu Kawasan Minapolitan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perikanan.

**Tabel 2**  
**Hasil Produksi Penangkapan dan bantuan jenis alat tangkap Pulau Moro di Kabupaten Karimun**

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (ton)			Alat Tangkap
		2020	2021	2022	
1.	Moro	3.453	4.790	4.430	Gillnet,jarring kurau, perahu,kapal bobot,bento ketam, dan alat pancing

*Sumber: Diolah oleh penulis (2022)*

Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun di daerah pesisir yaitu di Pulau Moro Kecamatan Moro sudah diterapkan, seperti program dari Pemerintah yaitu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), yaitu berupa bantuan alat tangkap yang diberikan kepada nelayan, sebenarnya program pemerintah untuk masyarakat nelayan ini sudah lama terutama dalam pemberdayaan nelayan, akan tetapi dampak dan manfaatnya belum maksimal dirasakan oleh masyarakat Pulau Moro Kabupaten Karimun

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Moro yaitu keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai Teknologi, tidak memiliki modal yang cukup, kurangnya kesadaran masyarakat Pulau Moro dalam memberdayakan dan juga mengembangkan potensi hasil panen tangkapan sendiri, dan juga pelatihan ataupun pelatihan yang cenderung tidak tersalurkan secara optimal, ditambah lagi semakin terbatasnya sumber daya laut yang bisa digunakan dan juga mekanisme pasar dan posisi tawar dihadapan tengkulak yang membuat nelayan semakin tidak berdaya.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap Penelitian pertama dilakukan oleh Matheus Nugroho (jurnal, 2015) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan”. Adapun hasil yang dicapai dari program ini adalah pola hidup nelayan di kabupaten pasuruan yaitu berupa interaksi sosial dan budaya yang masih kuat, namun pendapatan dan kesempatan berusaha masih rendah. Metode pelatihan dan pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan dapat meningkatkan ekonomi. Modal usaha nelayan yaitu aset yang dimiliki nelayan dan peluang pengembangannya, manajemen modal usaha nelayan serta skeptabilitas pengembangan modal usaha belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayu Mentari & Sufi (jurnal, 2019) dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan”. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan alat tangkap dan mekanisme pemberian bantuan alat tangkap dan boat, melakukan sosialisasi tentang cara penggunaan alat tangkap dan mekanisme pemberian bantuan, dilihat dari strategi sudah baik namun terkendala karena kurangnya fasilitas bantuan yang diberikan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan terhadap para nelayan sehingga bantuan yang diberikan tidak merata. Lalu hambatan eksternalnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin, AS (jurnal, 2010) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang”. Adapun hasil dari kegiatan penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Blanakan tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatannya cenderung lebih banyak dilakukan oleh Koperasi unit desa. Selanjutnya kurangnya pola pikir masyarakat terhadap pentingnya manfaat dari pemberdayaan yaitu dengan pelatihan, penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan proses

penangkapan ikan di laut. Kurangnya pola pikir masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana tujuan dan locus penelitian yang dilakukan yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat, upaya mengatasi faktor penghambat dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun. Sedangkan tujuan fokus dan kocus penelitian sebelumnya yakni untuk mengetahui pola hidup nelayan berupa (kondisi social, ekonomi, dan budaya), dan upaya pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja yang dapat dilakukan untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi dengan locus Kabupaten Pasuruan ( Matheus Nugroho ,2015). Kemudian penelitian kedua, tujuannya mengetahui strategi dinas kelautan dan perikanan Aceh Utara dan mengetahui hambatan internal serta eksternal dalam pelaksanaan pemberdayaan dengan locus Kabupaten Aceh Utara (Ayu Mentari & Sufi, 2019). Selanjutnya penelitian ketiga, tujuannya mengidentifikasi dan menguraikan dengan jelas dan mendalam tentang peran Lembaga pemberdayaan Desa Blanakan dalam peningkatan kehidupan masyarakat pesisir (nelayan) sebagai tugas pokok dan fungsinya, dan untuk memberi masukan kepada pihak terkait baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun pihak yang terkait dalam upaya peningkatan perekonomian nelayan dengan locus Kabupaten Blanakan (Zaenal Abidin AS ,2010)

#### **1.5 Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat, upaya mengatasi faktor penghambat dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun.

### **II. METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan analisis hasil penelitian menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto & Soebinto, 2018) dengan dimensi Bina Manusia Bina Usaha Bina Lingkungan Bina Kelembagaan. Menurut Arikunto (2013:172) sumber data yang di maksud adalah subjek dari data tersebut dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu person, place dan paper. Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling. Dengan Informan yakni Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Kepala Bidang Budidaya Perikanan , Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Camat Pulau Moro yang dimana masing-masing 1 Orang dan masyarakat nelayan 5 Orang. Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif pengumpulan data lebih sering bertumpu pada penulis sebagai alat pengumpul data utama Dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Tangkap di Pulau Moro**

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap ini tentunya memiliki tujuan untuk memberdayakan nelayan tangkap sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Adapun 4 (empat) upaya pokok dari teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato dijelaskan sebagai berikut:

##### **3.1.1 Bina Manusia**

Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku utama. Bina manusia adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau cara berpikir masyarakat nelayan yang pada umumnya nelayan tangkap di Pulau Moro berpendidikan akhir Sekolah Menengah Atas, oleh karena itu lingkup dari pemberdayaan dimensi bina manusia ini adalah meningkatkan kualitas dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik secara individu maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Februari 2023 menyatakan bahwa:

Dalam meningkatkan kemampuan atau kualitas SDM pada masyarakat nelayan, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Penyuluhan dan Pendampingan. Hal ini dilakukan dengan cara turun langsung pada masyarakat nelayan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan selanjutnya akan diberikan penyuluhan serta motivasi kepada mereka. Tujuannya agar masyarakat memiliki kesadaran untuk memperbaiki taraf hidup mereka serta merubah pola pikir mereka yang sempit agar menjadi berpikir maju kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa terdapat program ataupun kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Moro dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM. Diantara kegiatan dilakukan secara Online, Blended, dan Safari dalam meningkatkan kualitas SDM adalah dengan penyuluhan, pendampingan, pemberian motivasi, sosialisasi dan paling penting adalah dengan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk melatih kemampuan para nelayan dalam menangkap ikan. Adapun penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan untuk mengubah cara berfikir masyarakat nelayan sehingga makin maju, produktif dan berkualitas. Dari hal tersebut, dapat meningkatkan Visi dan misi bisnis ke depan serta wawasan yang luas tentang bagaimana mengelola potensi sumber daya alam di wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

##### **3.1.2 Bina Usaha**

Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Dalam pemberdayaan dimensi bina usaha ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

###### **A. Peningkatan aksesibilitas modal, pasar dan informasi**

Salah satu pengaruh besar dalam suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan para nelayan yaitu ketersediaan dana atau modal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat nelayan melalui handphone dapat diketahui bahwa Usaha yang dikembangkan dan dilakukan oleh nelayan tangkap di pulau moro umumnya menggunakan modal sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 23 Februari 2023 menyatakan bahwa: Dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat pemberian bantuan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai dan juga Karimun, agar dalam proses pemberdayaan nelayan tangkap guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Karimun dapat terlaksana dengan baik. Seperti pemberian bantuan modal sebagai perbekalan melaut dan peningkatan pemberian alat tangkap nelayan dan juga kendaraan laut seperti perahu dan juga kapal motor laut yang digunakan dalam proses pencarian sumber daya di laut Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan terdapat pemberian bantuan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada table 4.12. Bantuan sarana dan prasarana ini bertujuan agar dalam proses pemberdayaan nelayan dapat dilakukan dengan maksimal agar peningkatan perekonomian masyarakat nelayan di Pulau Moro dapat terlaksana dengan baik.

### **B. Manajemen produksi dan operasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tanggal 20 Februari 2023 bahwa:

Nelayan perikanan tangkap di Pulau Moro mempunyai karakteristik dengan berbagai alat tangkap. Terdapat berbagai jenis alat tangkap yang digunakan nelayan Pulau Moro adalah Alat tangkap jaring tenggiri / gill net permukaan, jaring pantai, pancing atau rawai, jala, jaring udang, Bento ketam, bubu, gillnet dasar, dan fishnet. Menurut pendapat dari lima informan masyarakat nelayan, menyatakan bahwa:

Alat yang digunakan sudah sesuai dengan standar untuk menangkap ikan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan harian sangat beragam, yaitu jaring rampus (gillnet), jaring kejer (gillnet), jaring kakap (gillnet), dan bubu. Jaring rampus merupakan alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan harian. Penggunaan berbagai jenis alat tangkap ini disesuaikan dengan musim dan jenis hasil tangkapan. Nelayan umumnya hanya membawa satu jenis alat tangkap ketika melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, alat tangkap juga merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap yang dapat dilihat pada table 1.2. Alat tangkap adalah peralatan yang digunakan nelayan dan pemancing untuk mendapatkan ikan dan hewan laut lainnya, alat tangkap ini juga dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu, kait, benang pancing, pemberat, batang pancing, roda pancing, umpan, indikator gigitan, tombak, jaring ikan, jebakan ikan

### **C. Peningkatan produktivitas nelayan tangkap**

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Februari 2023, menyatakan bahwa:

Adapun pelatihan-pelatihan lainnya, diantaranya Pelatihan Keselamatan Dasar di Atas Kapal Bagi Masyarakat Perikanan di Kabupaten Karimun yang dilaksanakan secara tatap muka, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, Pelatihan Mengatasi Gangguan Mesin Diesel Kapal Perikanan dan Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Pancing yang diselenggarakan secara online.

Hal senada disampaikan oleh masyarakat Nelayan pada tanggal 19 Februari 2023, menyatakan bahwa “Pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan tangkap di Pulau Moro”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun proses dalam meningkatkan produktivitas

nelayan tangkap dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat dilihat pada table 4.11 Dapat disimpulkan, berdasarkan hasil analisis peneliti dari hasilwawancara tersebut bahwa dengan adanya pemberdayaan melalui bina usaha merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa sehingga dapat menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah keberlangsungan hidup masyarakat nelayan.

### 3.1.3 Bina Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pemerintah untuk memajukan daerah maupun masyarakatnya. Namun yang harus diperhatikan adalah menjaga lingkungan sebaik mungkin. Selama ini, lingkungan sering kali diartikan sebagai lingkungan fisik saja, khususnya yang menyangkut sumber daya alam maupun lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Februari 2023, diketahui bahwa:

Nelayan di pulau moro, membuang limbah ke laut lepas pada tiga waktu, yaitu sebelum berangkat operasi, saat operasi penangkapan berlangsung dan setelah operasi penangkapan ikan berlangsung. Jarang sekali atau bahkan hampir dikatakan tidak ada nelayan yang sengaja mengumpulkan sampah di kapal untuk nantinya di buang ke tempat sampah. Limbah yang umumnya dihasilkan saat sebelum berangkat biasanya berupa oli bekas yang sengaja dibuang ke kolam pelabuhan saat ganti oli mesin. Adapun limbah yang dihasilkan saat penangkapan berlangsung biasanya berupa limbah sisa makanan, kemasan plastik atau kertas bekas pembungkus makanan, dan botol kaca atau plastik tempat minum atau bekas isi cairan lainnya. Selain itu, insang dan isi perut ikan, juga menjadi limbah yang dibuang saat penangkapan ikan berlangsung. Selain limbah padat, limbah cair yang merupakan bekas air yang digunakan untuk mencuci ikan, juga langsung dibuang begitu saja ke laut. Kemudian limbah yang dibuang setelah operasi penangkapan, umumnya dibuang ke kolam pelabuhan. Dari tercemarnya lingkungan akibat dari pembuangan limbah sembarangan tersebut, maka pemerintah melakukan pemberdayaan dalam mengatasi hal tersebut.

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Limbah Yang Berdampak Buruk Bagi Lingkungan Laut di Kabupaten Karimun**

No	Sumber	Dampak
1	Limbah Industri	Menyebabkan kematian organisme yang ada di air
2	Limbah Rumah Tangga	Menyebabkan berbagai penyakit dan kematian organisme yang ada di air
3	Limbah Pertanian	Menyebabkan kematian organisme yang ada di air dan menimbulkan eutrofikasi

Sumber : Website Dinas Sosial Kab.Karimun 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa pencemaran lingkungan memberikan efek yang tidak baik terhadap laut, darat dan udara. Pencemaran yang ada di laut menimbulkan efek pada nelayan tangkap. Adapun upaya yang dilakukan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah, juga memasang spanduk berisikan slogan atau himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemasangan spanduk dilakukan di beberapa tempat yang mudah terbaca oleh orang yang melakukan aktivitas di pelabuhan.



### 3.1.4 Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan mensyaratkan tersediannya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Februari 2023, menyatakan bahwa:

Adapun lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan nelayan tangkap adalah Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Pula Moro, Dan Seluruh Masyarakat Nelayan Tangkap Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun dapat terlaksana dengan baik. Seperti pemberian bantuan modal sebagai perbekalan melaut dan peningkatan pemberian alat tangkap nelayan dan juga kendaraan laut seperti perahu dan juga kapal motor laut yang digunakan dalam proses pencarian sumber daya di laut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa lembaga yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Kepala bidang Budidaya Perikanan, Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Pula Moro, Dan Seluruh Masyarakat Nelayan Tangkap Di Kecamatan Moror Kabupaten Karimun. Lembaga yang terikat tersebut berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi alam yang harus dikembangkan, sebagai fasilitator, dan sebagai pembimbing berjalannya berbagai program ataupun kegiatan yang telah direncanakan.

## 3.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Tangkap di Pulau Moro

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Pulau Moro Kabupaten Karimun, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Berikut penjelasannya:

### 3.2.1 Faktor Internal, meliputi:

#### A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 23 Februari 2023, bahwa:

Faktor pembanghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu berkaitan dengan kualitas SDM. Dari sisi keahlian yang menjadi permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya adalah SD atau tamat SMP. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kesadaran pendidikan yang kurang dan sulitnya lulusan sekolah dasar mengakses sekolah-sekolah menengah lanjutan karena hambatan geografis.

kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat nelayan yang harus dipenuhi oleh Dinas Perikanan Kabupaten karimun.

#### B. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sendiri memiliki fungsi yaitu mempermudah proses kerja, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan hasil lebih berkualitas. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah dapat dilihat pada table 4.14. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat nelayan pada tanggal 23 Februari 2023, bahwa:

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan tangkap Kabupaten Karimun

merupakan salah satu penghambat besar dalam peningkatakan pendapatan nelayan tangkap. Dinas Perikanan Kabupaten Karimun telah memberikan bantuan berupa fasilitas sarana dan prasarana bagi para nelayan tangkap yang ada di Kabupaten Karimun. Namun karena keterbatasan bantuan dari Dinas sehingga belum seluruhnya nelayan belum merasakan bantuan yang diberikan.

### C. Etos Kerja

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada tanggal 22 Februari 2023, bahwa: kurangnya kesadaran diri dari masyarakat nelayan tangkap mengenai etos kerja ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan kabupaten karimun jika kesadaran diri dari masyarakat yang diberdayakan masih kurang maka pemberdayaanpun tidak akan berjalan dengan maksimal.

### 3.2.2 Faktor Eksternal, meliputi:

#### A. Lambatnya Beradaptasi Dengan Kemajuan Teknologi

Salah satu penghambat dalam proses pemberdayaan yaitu rendahnya pengetahuan dari masyarakat tentang teknologi. Masyarakat pesisir Kabupaten Bintan kebanyakan berlatar belakang kurang pendidikan. Karena keterbatasan pengetahuan mereka, para nelayan kebanyakan masih melakukan penangkapan ikan dengan cara tradisional yang telah dilakukan para nelayan dari zaman dahulu. Sehingga dibutuhkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan pengetahuan teknologi bagi masyarakat nelayan khususnya nelayan tangkap skala kecil.

#### B. Cuaca Buruk

Bagi para nelayan keadaan cuaca sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kerja mereka dan hasil tangkap dari mereka. Akibat cuaca buruk atau tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan para nelayan merosot tajam dan hal ini secara otomatis mempengaruhi pendapatan dari para nelayan tangkap.

### 3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Tangkap di Pulau Moro

Dalam proses pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Kabupaten Karimun, Dinas prikanan harus melakukan upaya-upaya untuk dapat mengatasi faktor yang menghambat tercapainya pemberdayaan bagi nelayan tangkap. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

#### A. Melaksanakan program pemberdayaan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Februari 2023 menyatakan bahwa: Dalam meningkatkan kemampuan atau kualitas SDM pada masyarakat nelayan, upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Penyuluhan dan Pendampingan. Hal ini dilakukan dengan cara turun langsung pada masyarakat nelayan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat dan selanjutnya akan diberikan penyuluhan serta motivasi kepada mereka. Program ini sudah berjalan akan tetapi masyarakat nelayan belum maksimal menerima pelatihan dan penyuluhan yang kami berikan karna keterbatasan SDM yang mereka miliki Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan merupakan program dari Pemerintah

untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat nelayan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan rutin setiap satubulan sekali akan tetapi guna mengatasi faktor penghambat Pemerintah akan lebih mengoptimalkan program yang sudah berjalan dengan menambah jam kegiatan menjadi tiga bulan sekali. Adapaun Programnya antara lain adalah:

1) Penyuluhan dan Pendampingan

Hal ini dilakukan Dinas dengan cara turun langsung kepada masyarakat nelayan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat yang selanjutnya akan diberikan penyuluhan serta motivasi kepada mereka. Tujuannya agar masyarakat memiliki kesadaran untuk memperbaiki taraf hidup mereka serta merubah pola pikir mereka yang sempit agar lebih berpikir maju kedepan.

2) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan memiliki sasaran yaitu nelayan tangkap. Sosialisasi yang dilakukan untuk para nelayan tangkap yaitu sosialisasi keselamatan kerja, sosialisasi penggunaan alat tangkap, sosialisasi pemanfaatan sumber daya alam laut dan lainnya.

3) Pelatihan

Pelatihan ini berupa pelatihan keselamatan kerja dilaut, pelatihan pembuatan Alattangkap ramah Lingkungan (gillnet), pelatihan penggunaan GPS dan navigasi, dan pemasaran hasil tangkap. Pelatihan juga di sasarkan kepada para istri nelayan berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan tangkap yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

**B. Pemberian bantuan modal, sarana dan prasarana penangkapan ikan**

Untuk tercapainya pemberdayaan nelayan penangkap ikan di Kabupaten Karimun guna meningkatkan pendapatan nelayan harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 23 february 2023, bahwa:

Pemberian bantuan modal serta fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai dan juga dirasakan semua nelayan tangkap yang ada di Kabupaten Karimun, agar dalam proses pemberdayaan nelayan tangkap untuk meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Kabupaten Karimun dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 4**  
**Fasilitas Sarana dan Prasarana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada nelayan Tangkap di Pulau Moro**

No	Kecamatan	Bantuan yang diberikan		Instansi
		2021	2022	
1	Moro	5 unit kapal motor 5GT dan set alat tangkap	10 unit kapal motor 5GT dan set alat tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun

Dengan demikian, dengan adanya program pemberdayaan ini diharapkan dilaksanakan pada jangka yang panjang agar dapat benar-benar merubah taraf hidup masyarakat yang masih rendah menjadi lebih sejahtera khususnya pada masyarakat nelayan tangkap di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan pemberdayaan di sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karimun tersebut masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan kemiskinan rumah tangga nelayan tangkap ikan di Pulau Moro. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan tangkap ikan yang masih dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten). Peneliti mengambil 2 perbandingan Kecamatan, Kecamatan Moro sebagai Kecamatan dengan wilayah terluas dan Kecamatan Karimun adalah Kecamatan yang wilayahnya sedaratan dengan pusat Pemerintahan, sehingga menjadi fokus peneliti adalah Pulau Moro dengan status Kecamatan terluas masih memiliki pendapatan dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten), yang dimana berdampak kepada peningkatan segala usaha dan juga perbaikan kualitas kehidupan mereka. Keterbatasan modal usaha sehingga menyulitkan nelayan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi keluarganya.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro belum berjalan dengan optimal, dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah belum merata dirasakan seluruh masyarakat nelayan Pulau Moro.
2. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun, berupa: Faktor internal yang meliputi rendahnya keterampilan nelayan tangkap, kecilnya modal, dan kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan. Faktor eksternal yang meliputi lambatnya adaptasi nelayantangkap terhadap kemajuan teknologi, dan cuaca yang buruk pada musim angin barat.
3. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro Kabupaten Karimun, yaitu: Melaksanakan program pemberdayaan seperti penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Pemberian bantuan modal serta sarana dan prasarana penangkapan ikan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan nelayan tangkap di Pulau Moro.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Pulau Moro, beserta jajarannya dan Masyarakat Nelayan Pulau Moro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Mardikanto, T., & Soebinto P. (2013). *Pemberdayaan Dalam Perpektif Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Matheus. (2015). “*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai*”, *Jurnal Teknologi Pangan* 6 (1).

Abidin As, Z. ,(2019). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang*. J. Cakara Prabu.

Suryadi, A. M. & Sufi. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)*. *Negot. J. Ilmu Adm. Bisnis*. (2019)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan